

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini Penulis akan menyajikan tinjauan literatur yang mencakup teori-teori yang memberikan gambaran konsep dasar dari variabel-variabel yang diteliti. Penulis juga akan membahas penelitian sebelumnya sebagai acuan dan membandingkan metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan pembahasan tentang kerangka teoritis, yang mencakup model dan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang selanjutnya diikuti hipotesis penelitian.

2.1.1 Kemiskinan

2.1.1.1 Pengertian Kemiskinan

Secara umum menurut Badan Pusat Statistik (2011) ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu menggunakan hak-hak dasar mereka untuk menegakkan dan memajukan kehidupan yang layak, maka mereka dikatakan berada dalam kemiskinan. Definisi yang luas ini menunjukkan bahwa kemiskinan adalah masalah yang memiliki banyak aspek, sehingga sulit untuk mengukurnya dan perlu ada kesepakatan tentang metode pengukuran yang tepat.

Adapun definisi kemiskinan menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemiskinan merupakan masalah global dan menjadi sebuah

hambatan sosial yang lebih luas. Apabila kemiskinan terus mengalami peningkatan, maka kemiskinan menjadi masalah sosial karena akan mendorong individu atau kelompok untuk melakukan kejahatan. Kemiskinan juga dapat menjadi masalah sosial ketika stratifikasi sosial menciptakan tingkatan dan batasan dalam masyarakat. Jika hal itu terjadi, maka akan ada penyimpangan dan batasan dalam interaksi dan komunikasi antara orang-orang di tingkat atas dan bawah.

Menurut Kuncoro (2006), kemiskinan adalah ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan”. Kuncoro menjelaskan bahwa kemiskinan memiliki berbagai dimensi, termasuk kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural. Kemiskinan absolut terjadi ketika pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan kemiskinan relatif terjadi ketika distribusi pendapatan tidak merata dalam masyarakat. Kemiskinan struktural disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi dan politik, sementara kemiskinan kultural terkait dengan sikap dan nilai-nilai yang membatasi individu atau kelompok dari kemajuan ekonomi. Sementara itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari ataupun di cegah oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya.

Menurut Kuncoro (2006), salah satu penyebab kemiskinan adalah pola kepemilikan sumber daya yang tidak merata, sehingga menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata di masyarakat dan mengakibatkan rendahnya

kualitas dan kelangkaan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat miskin. Selain itu, rendahnya produksi masyarakat disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya gaji.

2.1.1.2 Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (2022) disebut sebagai kemiskinan makro. Data kemiskinan makro merupakan data yang diperoleh melalui mekanisme survey (sampel), bersifat kualitatif, memberikan gambaran umum dan profil suatu daerah, sebagai bahan analisis untuk pengambilan kebijakan makro penanggulangan kemiskinan, dan tidak dapat menampilkan secara *by name by address*. Contoh data makro yaitu kemiskinan Nasional dan Provinsi yang diterbitkan 2 kali setahun (periode Maret dan September) dan 1 kali setahun periode Maret untuk Kabupaten/Kota dalam Berita Resmi Statistik BPS.

Terdapat tiga indikator kemiskinan makro, yaitu Persentase Penduduk Miskin (P0), Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2). Namun yang sering dikenal dan lebih banyak digunakan ialah persentase penduduk miskin (P0). Berikut ini merupakan penjelasan dari ketiga indikator kemiskinan makro tersebut:

1. Persentase Penduduk Miskin (P0)

Persentase penduduk miskin (P0) adalah perbandingan jumlah orang miskin di suatu wilayah terhadap total penduduknya. Langkah pertama adalah menentukan berapa banyak orang miskin berdasarkan

rumus sederhana ini. Artinya, harus ada standar untuk menentukan siapa yang dianggap miskin.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut sebagai Penduduk Miskin. Dalam pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, kemiskinan diukur sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, bukan pengeluaran makanan. Oleh karena itu, orang yang memiliki pengeluaran perkapita rata-rata per bulan di bawah garis kemiskinan disebut sebagai penduduk miskin.

Rumus Perhitungan:

$$P\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$$

Dimana :

$$\alpha = 0$$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Dengan tidak adanya biaya transaksi dan hambatan, nilai agregat indeks kedalaman kemiskinan menggambarkan biaya pengentasan kemiskinan dengan menetapkan target bantuan yang ideal bagi masyarakat kurang mampu. Semakin besar potensi ekonomi untuk pendanaan pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik masyarakat miskin dan juga untuk memfokuskan bantuan dan program, maka semakin rendah nilai *poverty depth index*. (Ananda et al., 2022).

Menurut Izzati (2017), seberapa jauh penyimpangan pengeluaran masyarakat miskin dari garis kemiskinan ditunjukkan oleh indeks kedalaman kemiskinan. Misalnya, suatu daerah yang masyarakat miskinnya hanya mampu mengeluarkan uang Rp 15.000 per hari memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang rata-rata masyarakat miskinnya mampu mengeluarkan uang Rp 30.000 per hari, padahal kedua daerah tersebut memiliki ambang batas kemiskinan yang sama. Tingkat kerincian ini mempengaruhi jumlah pekerjaan yang dibutuhkan untuk membantu masyarakat miskin keluar dari kemiskinan. Dampaknya, setiap daerah mempunyai kebutuhan anggaran yang berbeda-beda.

Rumus Perhitungan:

$$P\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$$

Dimana :

$$\alpha = 1$$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang

berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks keparahan kemiskinan menunjukkan seberapa jauh pengeluaran orang termiskin di sebuah wilayah tertentu dibandingkan dengan pengeluaran rata-rata kelompok miskin di wilayah tersebut. Indeks yang lebih tinggi menunjukkan seberapa parah kemiskinan di wilayah tersebut, dan nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan seberapa jauh kemiskinan sebenarnya. Dengan mempertimbangkan tingkat kemiskinan ini, penting untuk memastikan bahwa dana yang diberikan kepada individu miskin dialokasikan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan individu tersebut untuk mengakhiri kemiskinannya.

Rumus Perhitungan:

$$P\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$$

Dimana :

$$\alpha = 2$$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang

berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Kemiskinan

Menurut Todaro & Smith (2020) kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua menurut sifatnya, yaitu:

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang penting untuk hidup. Penilaian kemiskinan ini dilakukan dengan mempertimbangkan pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan umum atau kebutuhan pokok.

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat yang terjadi karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh

lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Adapun dikutip dari buku Hukum dan Lingkungan Ekologi (2004), kemiskinan menurut penyebabnya terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan kondisi kemiskinan yang terjadi apabila pendapatan seseorang sudah berada di atas garis kemiskinan, tetapi secara relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat di sekitarnya.

2. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah jenis kemiskinan yang mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya.

2.1.1.4 Penyebab Kemiskinan

Dari sudut pandang ekonomi, kemiskinan disebabkan oleh tiga unsur, menurut Kuncoro (2006). Pertama, pola kepemilikan sumber daya yang tidak merata menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata, yang pada akhirnya menyebabkan kemiskinan. Sumber daya masyarakat miskin langka dan berkualitas buruk. Kemiskinan diakibatkan oleh disparitas kualitas sumber daya manusia pada kedua kasus tersebut. Produktivitas yang rendah dari sumber daya manusia yang berkualitas rendah menyebabkan upah yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan, kesulitan, diskriminasi, atau faktor genetik menjadi penyebab

buruknya kualitas sumber daya manusia. Ketiga, kesenjangan akses terhadap modal merupakan akar penyebab kemiskinan.

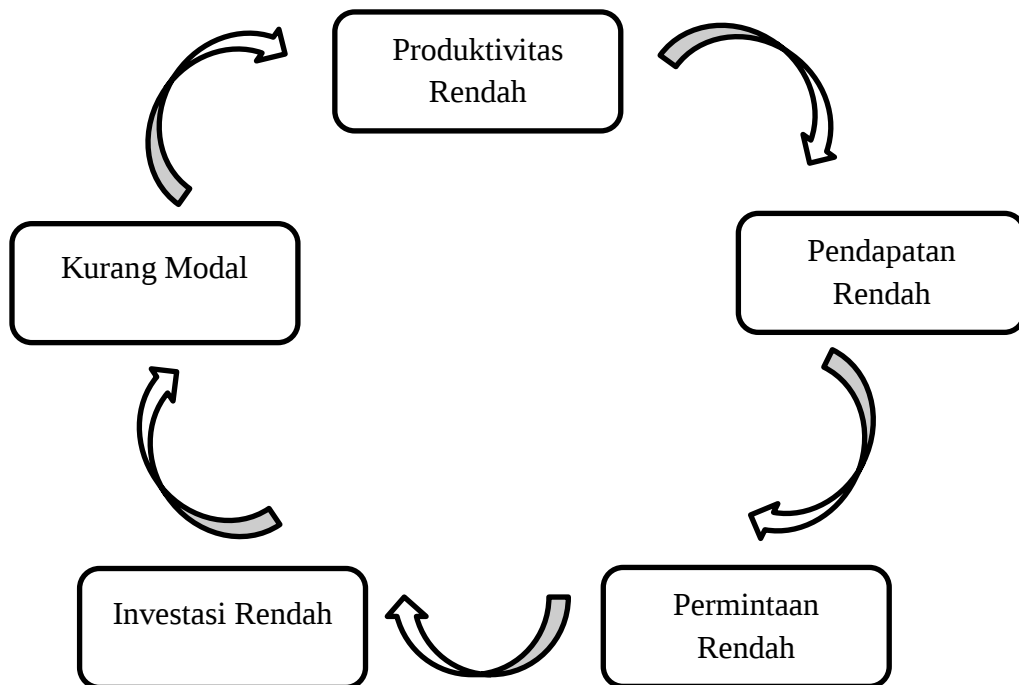
2.1.1.5 Teori Kemiskinan

1. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Teori *Vicious Circle of Poverty* atau lingkaran setan kemiskinan menurut Nurkse (1953) bahwa keterbelakangan sumber daya manusia dan sumber daya alam adalah akar penyebab kemiskinan. Produktivitas manusia sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam pasti akan diabaikan, terbelakang, dan bahkan disalahgunakan jika masyarakat sangat miskin dan tidak berpendidikan karena kurangnya keterampilan teknis, pengetahuan, dan aktivitas kewirausahaan.

Rendahnya produktivitas merupakan akibat dari keterbelakangan sumber daya manusia yang diwujudkan dalam rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya pasar, dan kurangnya modal. Pendapatan mereka rendah karena rendahnya produktivitas mereka. Rendahnya tabungan dan investasi akan berdampak pada rendahnya pendapatan. Investasi yang rendah menyebabkan rendahnya akumulasi modal, yang pada gilirannya menyebabkan rendahnya penciptaan lapangan kerja, rendahnya pendapatan menyebabkan kemiskinan, dan sebagainya. “Negara miskin menjadi miskin karena miskin)” adalah aksioma ekonom pembangunan ternama Ragnar Nurkse pada tahun 1953. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, ekonom pembangunan ternama, di tahun 1953 yang menyatakan “*a poor country is poor because it is poor*”). Menurut

Munker (2001), penyebab utama kemiskinan dalam bentuk lingkaran-lingkaran kemiskinan yang terdiri dari tiga pola yang tidak ada ujungnya sebagai berikut:



Gambar 2. 1

Lingkaran Setan Kemiskinan Menurut Nurkse

Sumber: Nurkse (1953) dalam Kuncoro (2006)

Setiap upaya pengentasan kemiskinan harus fokus pada pemutusan siklus dan perangkat kemiskinan karena negara-negara berkembang masih mempunyai ciri-ciri tertentu, khususnya sulitnya mengelola pasar dalam negerinya menjadi pasar persaingan yang lebih sempurna. Ketika mereka tidak mampu mengelola pembangunan ekonomi, maka dapat terjadi kecenderungan kekurangan modal, yang diikuti dengan rendahnya produktivitas, turunnya pendapatan riil, rendahnya tabungan, dan

menurunnya investasi sehingga berputar kembali pada situasi kekurangan modal, dan seterusnya, berputar-putar.

2. Teori Neo Liberal

Dalam teori neo-liberal, kemiskinan dilihat sebagai masalah individu yang disebabkan oleh kelemahan atau keputusan yang dibuat oleh individu tersebut. Kelemahan ini dapat berupa kelemahan yang berkaitan dengan pengaturan pendapatan atau kelemahan kepribadian seperti malas atau bodoh. Para pendukung teori ini setuju bahwa jika kekuatan pasar dapat diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi mungkin, kemiskinan akan hilang dengan sendirinya. Menurut teori ini, penanggulangan kemiskinan dapat dicapai melalui pembagian pendapatan secara selektif kepada individu yang miskin, serta memberikan pelatihan dan keterampilan pengelolaan keuangan.

3. Teori Sosial Demokrat

Menurut teori sosial demokrat, kemiskinan adalah masalah struktural. Menurut teori ini, ketidakadilan sosial dan ketimpangan struktur sosial dan politik adalah penyebab kemiskinan. Dengan kata lain, tertutupnya akses bagi kelompok tertentu, seperti yang tidak memiliki akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan sebagainya. Menurut teori sosial demokrat, penyebaran pendapatan dasar secara keseluruhan dan perubahan mendasar dalam pola distribusi pendapatan dapat dilakukan untuk mengatasi kemiskinan.

4. Teori Marjinal

Teori ini mengatakan bahwa di setiap wilayah pasti ada masyarakat yang memiliki tingkat kehidupan rendah atau miskin. Tokoh dari teori ini adalah Oscar Lewis, yang lahir pada tahun 1966. Teori marjinal yang mengaliarkan Konsep budaya kemiskinan sangat terkenal. Menurut Lewis, bahwa setiap masyarakat di dunia menjadi miskin karena budaya yang tidak peduli dengan kemajuan zaman dan ingin hidup sesuka hati tanpa merasa perlu menjalani kehidupan yang jauh lebih baik. Budaya ini pasrah dengan keadaannya, kurang pengetahuan dan pendidikan, kurang ambisi untuk membangun masa depan, dan didorong oleh kejahatan dan kekerasan.

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.1.2.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan pencapaian pembangunan manusia sebagai landasan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Di & Tahun, 2023). Kualitas sumber daya manusia suatu wilayah atau lokasi selama periode waktu tertentu juga tercermin dalam IPM. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator gabungan yang mengukur kemajuan kualitas hidup manusia.

Laporan Pembangunan Manusia dari UNDP tahun 1990 mencakup konsep dan definisi pembangunan manusia serta metode untuk mengukurnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator pembangunan manusia yang

dibuat oleh UNDP dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan HDR sejak tahun 1990. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam bidang seperti pendidikan, pendapatan, dan kesehatan.

Tiga dimensi umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak yang membentuk indeks pembangunan manusia diperkenalkan pada HDR tahun 1990. Empat ukuran yang digunakan untuk menghitung IPM yaitu harapan hidup saat lahir (UHH), angka melek huruf (AMH), angka partisipasi kasar (APK), dan produk domestik bruto (PDB) per kapita. Pendekatan rata-rata aritmatika merupakan metode agregasi yang digunakan untuk menentukan IPM.

2.1.2.2 Dimensi Pembangunan Manusia

Pada tahun 1990 UNDP menetapkan tiga dimensi pembentuk IPM. Ketiga dimensi ini merupakan pendekatan yang dipilih dalam penggambaran kualitas hidup manusia dan tidak mengalami perubahan hingga saat ini. Ketiga dimensi tersebut diantaranya:

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umum harapan hidup saat lahir. Menurut kepercayaan umum, umur panjang merupakan hal yang berharga dan kenyataan bahwa terdapat berbagai faktor yang secara tidak langsung berkaitan erat dengan umur harapan hidup, seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik.

Umur harapan hidup saat lahir (UHH) adalah rata-rata jumlah tahun yang dapat dijalani seseorang. Metode yang digunakan untuk

mengukur umur harapan hidup yaitu pendekatan tidak langsung (*indirect estimation*). Indeks harapan hidup dihitung berdasar nilai maksimum dan minimum harapan hidup yang sesuai dengan standar UNDP, yaitu 85 tahun untuk nilai maksimum dan 20 tahun untuk nilai minimum.

2. Pengetahuan (*knowledge*)

Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan dimensi pengetahuan yang dimiliki masyarakat. Indikator HLS menunjukkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal, sedangkan RLS menunjukkan stok modal manusia yang dimiliki masyarakat.

Harapan lama sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak yang berumur 7 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan indeks pendidikan didasarkan pada rata-rata indeks HLS dan RLS dengan bobot yang sama. Untuk menghitung indeks HLS dan RLS, digunakan batasan nilai maksimum dan minimum yang sama dengan standar UNDP, yaitu 18 dan 0 tahun untuk HLS dan 15 dan 0 tahun untuk RLS.

3. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

Indikator yang digunakan dalam mengukur dimensi standar hidup layak (*decent standard of living*) yaitu Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. Akan tetapi, sebagai alternatif lain digunakan indikator

pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, karena data Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita tidak tersedia di tingkat daerah. Indikator pengeluaran riil per kapita mampu mencerminkan indikator pendapatan masyarakat dan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai *output* dari semakin membaiknya perekonomian.

2.1.2.3 Teori-teori Indeks Pembangunan Manusia

Berikut ini merupakan beberapa teori pertumbuhan indeks pembangunan manusia regional, diantaranya:

1. *Human Capital Theory*

Human Capital dan modal kapital merupakan dua konsep dasar dalam bahasa. Dalam definisi ini, kapital dalam *human capital* dipandang sebagai suatu bentuk modal yang serupa dengan mesin dan teknologi, yang berfungsi sebagai faktor produksi untuk menciptakan barang atau jasa tanpa mengonsumsinya selama proses produksi. Semua aktivitas ekonomi, seperti produksi, konsumsi, dan transaksi, merupakan peran yang dilakukan oleh manusia (Nurkholis, 2018).

Seiring dengan perkembangan teori ini, konsep *human capital* dapat dibagi menjadi tiga. Konsep pertama adalah *human capital* sebagai aspek individu, yang menyatakan bahwa modal manusia adalah kemampuan yang ada pada individu, seperti pengetahuan dan keterampilan. Hal ini diperjelas oleh Rastogi (2002) yang menyebutkan bahwa *human capital* mencakup pengetahuan, kompetensi, sikap, kesehatan, dan sifat yang dimiliki oleh individu. Konsep kedua melihat

human capital sebagai pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan formal seperti sekolah, kursus, dan pelatihan. Konsep ini menekankan bahwa *human capital* merupakan hasil dari akumulasi proses tertentu (Syah, 2021), dan tidak bersumber dari pengalaman individu

Konsep ketiga memandang *human capital* dari perspektif produksi, di mana Romer (1990) menganggapnya sebagai sumber utama produktivitas ekonomi. *Human capital* juga dipandang sebagai investasi yang dilakukan individu untuk meningkatkan produktivitasnya (Rosen, 1999). Menurut Frank & Bernanke (2007), *human capital* adalah kombinasi dari pendidikan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan, kesehatan, energi, dan inisiatif yang memengaruhi produktivitas individu. Schultz (1961) menambahkan bahwa *human capital* adalah faktor penting dalam meningkatkan produktivitas ekonomi suatu negara. Konsep ini pertama kali muncul dalam ekonomi klasik pada tahun 1776 (Fitzsimons, 1999).

Human capital dapat diperoleh melalui dua cara. Pertama, dengan memanfaatkan jumlah tenaga kerja, yang menyatakan bahwa semakin banyak tenaga kerja, semakin tinggi produktivitas. Kedua, dengan melakukan investasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, yang meningkatkan keterampilan dan kemampuan individu, sehingga produktivitasnya juga meningkat. Pendekatan kedua ini lebih menekankan kualitas tenaga kerja dibandingkan kuantitasnya.

Todaro & Smith (2020) menyebutkan bahwa *human capital* dapat diukur melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu, sementara kesehatan berperan penting dalam mendukung produktivitas. Pendidikan yang tinggi tidak akan efektif tanpa tubuh yang sehat, dan pendidikan juga dapat meningkatkan kesadaran kesehatan seseorang (Nurkholis, 2018).

2. *Sustainable Development Theory*

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah serangkaian tujuan atau dokumen yang diresmikan pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dari program MDGs yang telah berakhir. Dokumen ini mencakup 17 tujuan yang lebih terperinci dibandingkan dengan ICPD dan MDGs. Salah satu tambahan penting dalam SDGs adalah penekanan pada isu-isu lingkungan. Dokumen ini bertujuan untuk mengintegrasikan konsep Tujuan Pembangunan Ekonomi, Tujuan Pembangunan Kependudukan, dan Tujuan Pembangunan Lingkungan, yang semuanya bertujuan untuk mencapai keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan di sini dimaksudkan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan kebutuhan di masa depan.

2.1.2.4 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Setiap indikator komponen perhitungannya dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia penduduknya.

IPM juga berfungsi sebagai salah satu indikator target pembangunan dan salah satu alokator dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator utama kinerja Dana Insentif Daerah (DID) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga digunakan sebagai salah satu indikator pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID).

2.1.3 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk secara umum adalah total semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama jangka waktu tertentu serta sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan Negara (Yenny & Anwar, 2020). Penduduk menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun ataupun lebih.

Menurut Nelson dan Leibstein (dikutip dari Sadono Sukirno, 1983), terdapat hubungan langsung antara pertambahan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Mereka menunjukkan fakta bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat terjadi di negara-negara tertentu memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat mereka. Hal ini menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang signifikan dan akhirnya akan menurun dan jumlah penduduk miskin akan meningkat (Stevani dan Arief, 2020).

Teori transisi demografi menjelaskan pergeseran dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi menuju tingkat kelahiran dan kematian yang rendah seiring dengan perkembangan ekonomi, dari masyarakat pra-industri ke ekonomi yang lebih terindustrialisasi. Teori ini kemudian diperluas oleh Frank Notestein pada tahun 1945, yang menguraikan bagaimana perubahan tingkat kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas) memengaruhi distribusi usia dan laju pertumbuhan penduduk (Diggs, 2008). Teori Transisi Demografi ini mendapat dukungan luas dari para ahli karena terdapat hubungan historis yang kuat antara penurunan angka kelahiran dengan kemajuan sosial dan ekonomi.. Transisi demografi terdiri dari tiga tahap (Todaro & Smith, 2020) yaitu :

1. Tahap pertama terjadi pada masa pra-industri, di mana tingkat kelahiran dan kematian keduanya sangat tinggi, sehingga pertumbuhan penduduk berada dalam keadaan seimbang dengan laju pertumbuhan yang stabil atau sangat lambat.
2. Tahap kedua dimulai setelah modernisasi, yang membawa perbaikan dalam pelayanan kesehatan, pola makan yang lebih bergizi, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kualitas hidup secara umum. Perubahan ini menyebabkan penurunan signifikan dalam angka kematian, sementara angka kelahiran tetap tinggi. Akibatnya, laju pertumbuhan penduduk meningkat tajam dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tahap ini menandai awal dari transisi demografi, yakni peralihan dari pertumbuhan penduduk yang lambat atau stabil, menuju peningkatan pesat, sebelum akhirnya kembali menurun.

3. Tahap ketiga terjadi di tengah proses modernisasi dan pembangunan, yang menyebabkan penurunan tajam pada tingkat kelahiran, bahkan mencapai tingkat yang setara dengan angka kematian, sehingga pertumbuhan penduduk secara netto sangat rendah, bahkan mendekati nol.

Transisi demografi yang terjadi di seluruh dunia selama seratus tahun terakhir telah diidentifikasi sebagai salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Penurunan signifikan dalam pertumbuhan penduduk kemudian mempercepat akumulasi faktor produksi dan kemajuan teknologi, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan pendapatan per kapita. (Galor, 2005). Perubahan dalam struktur usia suatu negara dapat memengaruhi kinerja ekonominya. Negara dengan proporsi anak yang tinggi cenderung mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk perawatan mereka, yang dapat membebani pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika mayoritas populasi berada dalam kelompok usia kerja, produktivitas tambahan dari kelompok ini dapat menciptakan bonus demografi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. (Sulistiawati, 2021).

Hubungan negatif antara teori transisi demografi dan kemiskinan dapat muncul melalui peningkatan jumlah penduduk produktif yang berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Dalam tahap lanjutan transisi demografi, yang disebut *dividen demografis*, tingkat kelahiran menurun sementara proporsi penduduk usia kerja meningkat dibandingkan dengan jumlah tanggungan anak-anak dan lansia. Situasi ini menciptakan peluang ekonomi yang signifikan, karena lebih banyak

penduduk yang memasuki usia produktif dan dapat bekerja serta menghasilkan pendapatan. Dengan syarat adanya akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja, populasi produktif ini mampu meningkatkan produktivitas ekonomi, mendorong pertumbuhan pendapatan per kapita, dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Penurunan tingkat kemiskinan dalam kondisi ini terjadi karena pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk usia kerja dapat dialokasikan untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, yang sebelumnya sulit dijangkau akibat tingginya beban ketergantungan. Selain itu, peningkatan tabungan dan investasi dalam sektor ekonomi lebih memungkinkan pada tahap ini, yang memperkuat pembangunan ekonomi jangka panjang.

2.1.4 Swamedikasi

Swamedikasi adalah pilihan pengobatan diri sendiri yang biasanya digunakan untuk mengobati penyakit ringan seperti demam, nyeri, pusing, batuk, flu, diare, dan penyakit kulit. Pedoman yang terpadu diperlukan untuk mencegah kesalahan pengobatan saat melakukan swamedikasi (Erina, 2019). Swamedikasi merupakan sebuah tindakan masyarakat dalam mengobati dirinya sendiri, dimana dalam pemilihan dan penggunaan obat terhadap penyakit atau gejala dengan menggunakan obat-obatan yang tersedia tanpa resep dokter, serta aman bila digunakan. Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pengobatan sakit ringan, dan pengobatan rutin penyakit kronis setelah perawatan dari dokter. Swamedikasi biasanya digunakan oleh masyarakat yang mengalami gejala-gejala ringan seperti batuk, pilek, pusing, dan penyakit kulit (Agnes, 2024).

Tindakan pengobatan mandiri (swamedikasi) ini akan memberikan manfaat bagi kesehatan karena akan menurunkan biaya kesehatan. Namun, apabila praktiknya tidak tepat maka akan membahayakan bagi kondisi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk melakukan pengobatan mandiri secara bijak.

Swamedikasi di kalangan masyarakat miskin dapat dikaitkan dengan Teori Keterbatasan Akses dalam ekonomi kesehatan, yang menyatakan bahwa keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mendorong individu mencari alternatif perawatan yang lebih terjangkau, seperti swamedikasi. *Grossman's Health Production Theory* juga relevan, di mana kesehatan dipandang sebagai modal yang harus "diinvestasikan". Michael Grossman dalam teori *Demand for Health* menyatakan bahwa kesehatan adalah bentuk modal manusia yang mempengaruhi produktivitas individu. Dari teori, Grossman menggambarkan *demand for health* (permintaan kesehatan) dan *demand for medical care* (permintaan pelayanan kesehatan) dengan pendekatan *human capital*. Grossman menyatakan bahwa yang diinginkan masyarakat adalah kesehatan, bukan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan *derivat demand* (kebutuhan turunan) yang berfungsi sebagai input untuk menghasilkan kesehatan. Masyarakat memenuhi kebutuhan kesehatan secara aktif, menghasilkannya, menggunakan waktu untuk usaha-usaha peningkatan kesehatan, sekaligus menggunakan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, kesehatan dapat dianggap sebagai bahan konsumsi sekaligus investasi. Kesehatan merupakan bahan investasi karena bersifat tahan lama serta tidak terdepresiasi dengan segera (Heryana et al., 2019).

Namun, dalam masyarakat dengan kedalaman kemiskinan yang tinggi, kemampuan untuk "menginvestasikan" dalam kesehatan berkurang akibat keterbatasan pendapatan dan akses ke layanan kesehatan formal, sehingga swamedikasi menjadi solusi sementara meskipun berisiko jangka panjang.

Menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang kehilangan tiga hal utama, yaitu:

1. Kehidupan (lebih dari 30 persen penduduk negara-negara yang paling miskin cenderung hidup kurang dari empat puluh tahun).
2. Pendidikan dasar (diukur dari persentase penduduk dewasa yang buta huruf).
3. Ketetapan ekonomi (*economic provisioning*) diukur oleh persentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan air bersih ditambah persentase anak-anak di bawah usia lima tahun yang kekurangan berat badan.

Maka dari itu, dengan banyaknya jumlah penduduk yang tidak memiliki akses ke pelayanan kesehatan cenderung akan melakukan tindakan swamedikasi. Swamedikasi tentunya akan mengurangi pengeluaran biaya pengobatan, akan tetapi juga sangat berisiko apabila tidak dilakukan dengan ilmu pengetahuan yang memadai.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan dalam penelitian baru. Penelitian terdahulu ini berfungsi untuk menemukan inspirasi baru, mencegah terjadinya plagiasi, membantu peneliti menunjukkan orisinalitas penelitian, dan membantu peneliti mendapatkan solusi baru dan original. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang masih memiliki satu tema dengan penelitian yang dikaji:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Juhar Monang S. Tambun dan Rita Herawaty (2018) “Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Menggunakan Regresi Data Panel”	Variabel Dependen: Indeks Kedalaman Kemiskinan	Variabel Dependen: Indeks Keparahanan Kemiskinan Variabel Independen: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pertumbuhan Ekonomi (EG), Pertumbuhan PAD (LnPAD), Pertumbuhan Pengeluaran Rumah Tangga (LnEXP), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (MYS), dan Harapan	TPT berpengaruh signifikan. TPAK tidak berpengaruh signifikan. EG tidak berpengaruh signifikan. LnPAD tidak berpengaruh signifikan. LnEXP berpengaruh signifikan. AMH berpengaruh positif signifikan. MYS berpengaruh negatif	Jurnal Ilmu Administrasi Publik 6 (1) (2018): 100-110

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Lama Sekolah (EYS)	signifikan. EYS tidak berpengaruh signifikan.	
2	Luthfiah Syahrazad dan Ullya Vidriza (2024) “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2017-2022”	Variabel Dependen: Indeks Kedalaman Kemiskinan Variabel Independen: Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Independen: Tingkat Pengangguran Terbuka	JPN berpengaruh positif signifikan terhadap IKK. TPT berpengaruh negatif signifikan terhadap IKK. IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap IKK.	<i>Jurnal of Development Economic And Digitalization</i> Vol. 3, No. 1, 2024, pp. 109-129, P-ISSN 2963-6221; E-ISSN 2962-8520
3	Kharisma Pandu Utama, Liza Kurnia Sari (2021) “Analisis Spasial Indeks Kedalaman Kemiskinan Tiga Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2021”	Variabel Dependen: Indeks Kedalaman Kemiskinan	Variabel Independen: PDRB Perkapita, Persentase Penduduk Miskin, Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi yang Layak, Rata-rata Lama Sekolah	PDRB berpengaruh negatif signifikan. Persentase penduduk miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks kedalaman kemiskinan. Persentase rumah tangga dengan sanitasi yang layak berpengaruh negatif signifikan. Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan.	<i>Seminar Nasional Official Statistics 2023</i>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Hamidah Dian Nofita, Purwiyanta, Didit Welly Udjianto (2023) “Determinan Indeks Kedalaman Kemiskinan Indonesia Tahun 1999-2020”	Variabel Dependen: Indeks Kedalaman Kemiskinan Variabel Independen: Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Independen: Indeks Gini, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Indeks gini berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks kedalaman kemiskinan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks kedalaman kemiskinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan	Jurnal Perspektif Ekonomi Volume 16, Nomor 1, Januari 2023 ISSN 1907-607X
5	Marsandhi Evan Dino Pardede, Budiasih (2023) Kajian Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2021”	Variabel Dependen: Indeks Kedalaman Kemiskinan	Variabel Independen: Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Dana Bantuan Operasional Kesehatan, Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Dana Bantuan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah serta Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui dana-dana yang signifikan mampu menurunkan kedalaman kemiskinan di Provinsi Papua adalah Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan PAUD.	<i>Seminar Nasional Official Statistics 2023</i>
6	Dimas Pangestu, Purwiyanta,	Variabel Dependen:	Variabel Dependen:	Indeks Pembangunan	Jurnal Pendidikan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Wahyu Dwi Artaningtyas (2023) “Determinan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan di Indonesia Tahun 1999-2000”	Indeks Kedalaman Kemiskinan Variabel Independen: Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Keparahan Kemiskinan Variabel Independen: Indeks Gini, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi	Manusia 1 tahun sebelumnya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kedalaman kemiskinan di Indonesia tahun 1999 – 2020. Pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kedalaman kemiskinan di Indonesia tahun 1999 – 2020. Indeks gini memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kedalaman kemiskinan di Indonesia tahun 1999 – 2020. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun sekarang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap keparahan kemiskinan di Indonesia tahun 1999 – 2020.	Ekonomi 5(1) Indonesia (2023) 61-72

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Hasmah, Gita Asrani (2020) “Aplikasi Regresi Panel Pada Model Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan”	Variabel Dependen: Indeks Kedalaman Kemiskinan Variabel Independen: Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Independen: PDRB ADHK, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Hasil pengujian model tersebut diperoleh bahwa PDRB ADHK dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan Sulawesi Selatan.	INFINITY-Jurnal Matematika dan Aplikasinya (IJMA) Volume 1 Nomor 1
8	Kurnia Saputri, Didit Welly Udjianto (2023) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Investasi Domestik, Pendidikan, Swamedikasi, dan Pengangguran Terbuka terhadap Kedalaman Kemiskinan di Indonesia”	Variabel Dependen: Indeks Kedalaman Kemiskinan Variabel Independen: Swamedikasi	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Investasi Domestik, Pendidikan, dan Pengangguran Terbuka	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap indeks kedalaman kemiskinan dengan koefisien negatif terhadap indeks kedalaman kemiskinan. Ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap kedalaman kemiskinan tidak cukup signifikan. Investasi domestik menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap kedalaman kemiskinan	Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 5 Nomor 1 Maret 2023 Hal 29-38 ISSN: 2503-3093 (<i>online</i>)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				tidak cukup signifikan.	
				Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kedalaman kemiskinan dengan koefisien negatif.	
				Swamedikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kedalaman kemiskinan di Indonesia.	
				Pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap kedalaman kemiskinan dengan koefisien positif	
9	Mutia Helma (2023) “ <i>Factors Influencing the Poverty Gap Index in West Sumatra Province through Panel Data Regression Analysis</i> ”	Syifa, (2023) Variabel Dependen: Indeks Kedalaman Kemiskinan Variabel Independen: Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi, Harapan Tahun Sekolah, Rata-rata Pengeluaran Per Kapita	Variabel bebas yang berpengaruh adalah rata-rata pengeluaran per kapita yang berpengaruh positif dan indeks pembangunan manusia yang berpengaruh negatif terhadap indeks kedalaman kemiskinan.	<i>Mathematical Journal of Modelling and Forecasting</i> Vol. 1, No. 2, December 2023, pp. 15-22 ISSN: 2988-1013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Rizky Mahesa Wahid, Sudati Nur Safiah (2021) “Analysis of Factors Affecting the Poverty Gap Index in Aceh Province 2017-2019”	Variabel Dependen: Indeks Kedalaman Kemiskinan	Variabel Independen: Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kriminalitas, Rasio Ketergantungan dan Rasio Jenis Kelamin	Dari uji F-statistik dinyatakan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka, tingkat kriminalitas, rasio ketergantungan, dan rasio jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap indeks kedalaman kemiskinan. Secara parsial, yang mempengaruhi indeks kedalaman kemiskinan adalah rasio ketergantungan, sedangkan tingkat pengangguran terbuka, tingkat kriminalitas dan rasio jenis kelamin tidak mempengaruhi indeks kedalaman kemiskinan.	<i>Research Horizon</i> Vol. 1, no. 6, (2021), 217-228
11	Yudhistira Hamid, Edy Widodo (2023) “Pemodelan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2017-2022 dengan Regresi	Variabel Dependen: Indeks Kedalaman Kemiskinan Variabel Independen: Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Independen: Persentase Penduduk Miskin	Variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap indeks kedalaman kemiskinan. Variabel persentase	<i>Emerging Statistics and Data Science Journal</i> Vol. 1, No. 3, Tahun 2023 P-ISSN: 2986-417 E-ISSN: 2988-4004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Data Panel"			penduduk miskin memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks kedalaman kemiskinan.	
12	Aini Rizqa Apriliani, Safrida, Fajri (2023) "Pengaruh Pengangguran terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Aceh"	Variabel Dependen: Indeks Kedalaman Kemiskinan	Variabel Independen: Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Setengah Pengangguran, dan Tingkat Pengangguran Paruh Waktu	Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap indeks kedalaman kemiskinan. Tingkat setengah pengangguran berpengaruh negatif terhadap indeks kedalaman kemiskinan. Tingkat pengangguran paruh waktu berpengaruh positif terhadap indeks kedalaman kemiskinan	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian E-ISSN: 2614-6053 P-SSN: 2615-2878 Volume 8, Nomor 1, Februari 2023 www.jim.unsyiah.ac.id/JFP
13	Tyas Saffhira, Saparudin Mukhtar, Suparno (2023) "Analysis of Factors Affecting the Regional Poverty Gap Index"	Variabel Dependen: Indeks Kedalaman Kemiskinan	Variabel Independen: Rasio Ketergantungan, Rata-rata Lama Sekolah, dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan	Rasio ketergantungan berpengaruh positif terhadap indeks kedalaman kemiskinan, sedangkan rata-rata lama sekolah dan produk domestik regional bruto	Jurnal Pendidikan Ekonomi, Pekantoran, dan Akuntansi E-ISSN: 2722-9750 Volume 4 No. 2 (2023)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				berpengaruh negatif terhadap indeks kedalaman kemiskinan.	
14	Ni Made Shantia Ananda, Anggi Jaya Utami, Rani Mirnawati, dan Darnah Andi Nohe (2022) “Pemodelan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur dengan Regresi Data Panel”	Variabel Dependen: Indeks Kedalaman Kemiskinan Variabel Independen: Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Independen: Produk Domestik Regional Bruto	Berdasarkan hasil penelitian, variabel IPM berpengaruh negatif terhadap indeks kedalaman kemiskinan dan variabel PDRB per kapita atas dasar harga berlaku berpengaruh positif terhadap indeks kedalaman kemiskinan.	Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, dan Aplikasinya Terbitan II, Mei 2022, Samarinda, Indonesia E-ISSN: 2657-232X
15	Aminnullah Achmad Muttaqin, Anis Safitri (2021) “Analisis Pengaruh Zakat dan Infak terhadap Tingkat Kedalaman Kemiskinan, Keparahatan Kemiskinan dan Gini Rasio di Indonesia”	Variabel Dependen: Indeks Kedalaman Kemiskinan	Variabel Independen: Zakat dan Infak	Zakat memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kedalaman kemiskinan. Infak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kedalaman kemiskinan.	Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2021, Vol. 6, No. 1, Hal. 51-61 P-ISSN: 2460-9404; E-ISSN:2460-9412

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran dan kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari masalah yang ditetapkan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan digunakan untuk memahami seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, memberikan gambaran yang lebih mendalam dibandingkan hanya menggunakan persentase penduduk miskin. Sementara persentase penduduk miskin hanya menunjukkan proporsi populasi yang berada di bawah garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan mengukur intensitas kesenjangan ekonomi yang dialami oleh kelompok tersebut. Selain itu, dibandingkan dengan indeks keparahan kemiskinan yang mencerminkan distribusi ketimpangan di antara penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan lebih fokus pada rata-rata jarak pengeluaran dari garis kemiskinan. Hal ini membuat indeks kedalaman kemiskinan lebih relevan untuk perumusan kebijakan yang bertujuan mengurangi kesenjangan kemiskinan secara rata-rata, karena memberikan data kuantitatif yang menggambarkan kebutuhan pengeluaran minimum untuk mengangkat penduduk miskin mendekati atau melampaui garis kemiskinan.

Penelitian ini menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk, dan swamedikasi terhadap indeks kedalaman kemiskinan di empat Provinsi Indonesia. Menurut teori sosial demokrat, kemiskinan merupakan

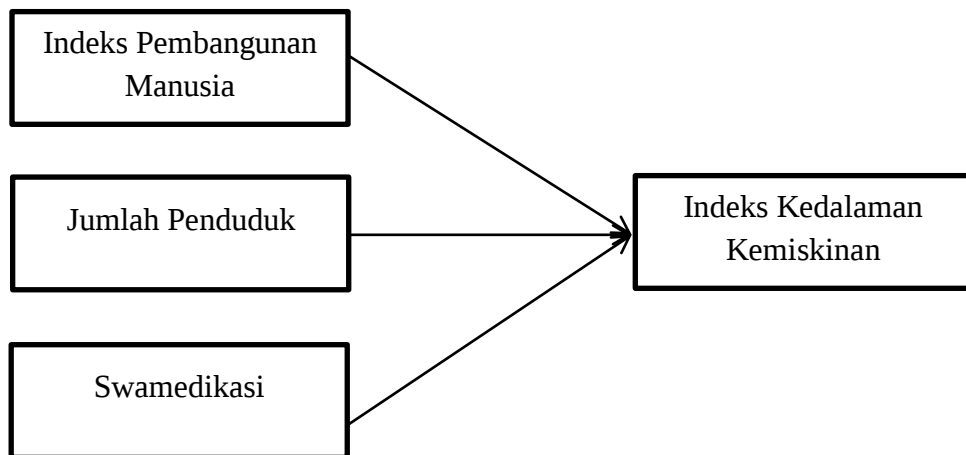
masalah struktural. Menurut teori ini, ketidakadilan sosial dan ketimpangan struktur sosial dan politik merupakan penyebab kemiskinan. Dengan kata lain, terbatasnya akses bagi kelompok tertentu, seperti yang tidak memiliki akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan sebagainya. Variabel Independen yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk, dan swamedikasi berpengaruh terhadap indeks kedalaman kemiskinan.

Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks kedalaman kemiskinan. Peningkatan yang terjadi pada indeks pembangunan manusia akan menyebabkan penurunan pada indeks kedalaman kemiskinan, begitupun sebaliknya. Hubungan tersebut dapat dilihat pada kenaikan indeks pembangunan manusia yang diiringi oleh penurunan indeks kedalaman kemiskinan di tahun 2018 dan pada kenaikan indeks pembangunan manusia yang diiringi oleh penurunan indeks kedalaman kemiskinan di tahun 2021. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamid & Widodo (2023) menghasilkan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks kedalaman kemiskinan. Kemudian, menurut teori transisi demografi hubungan negatif antara teori transisi demografi dan kemiskinan dapat muncul melalui peningkatan jumlah penduduk produktif yang berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Dalam tahap lanjutan transisi demografi, yang disebut *dividen demografis*, tingkat kelahiran menurun sementara proporsi penduduk usia kerja meningkat dibandingkan dengan jumlah tanggungan anak-anak dan lansia. Situasi ini menciptakan peluang ekonomi yang signifikan, karena lebih banyak penduduk yang memasuki usia produktif dan dapat bekerja serta menghasilkan pendapatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sembiring et al. (2023) menyebutkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota-kota Provinsi Jawa Barat. Secara keseluruhan, ada banyak hubungan antara jumlah penduduk dan kedalaman kemiskinan.

Di sisi lain, kedalaman kemiskinan mengukur seberapa jauh pendapatan rata-rata penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk yang tinggal di daerah dengan keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan formal (klinik, rumah sakit, dan puskesmas) sering kali memilih untuk melakukan swamedikasi. Dalam konteks teori *demand for health*, pengobatan mandiri dapat menjadi respons terhadap biaya pengobatan yang mahal atau tidak terjangkaunya layanan medis profesional, terutama di negara berkembang. Dengan pengobatan mandiri, individu menggunakan obat-obatan yang dapat dibeli bebas atau mengandalkan pengetahuan tradisional untuk mengatasi penyakit ringan hingga sedang tanpa konsultasi medis profesional. Ini terjadi karena keterbatasan sumber daya, seperti biaya yang harus dikeluarkan untuk berobat ke dokter atau rumah sakit, serta waktu yang harus diinvestasikan dalam mengakses layanan kesehatan. Penelitian sebelumnya yang membahas hubungan antara swamedikasi dengan indeks kedalaman kemiskinan masih sangat terbatas. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Saputri & Udjianto (2023) menyatakan bahwa variabel swamedikasi berpengaruh positif terhadap indeks kedalaman kemiskinan. Swamedikasi mengindikasikan bahwa terdapat masyarakat yang tidak mampu untuk berobat ke fasilitas kesehatan. Ketidakmampuan ini akan menyebabkan risiko kematian akibat pemakaian obat tanpa resep dari dokter.

Secara sistematis, kerangka pemikiran tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 2
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Adapun hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga secara parsial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan jumlah penduduk berpengaruh negatif. Sedangkan secara parsial swamedikasi berpengaruh positif terhadap indeks kedalaman kemiskinan.
2. Diduga secara bersama-sama Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk, dan swamedikasi berpengaruh terhadap indeks kedalaman kemiskinan.